

ANALISIS KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN NELAYAN DI NEGERI URENG KECAMATAN LEIHITU

Alif Fatahillah Sukandar¹, Pieter Th. Berhиту² Adnan Affan Akbar Botanri³
^{1, 2, 3}Universitas Pattimura, Jl. Ir. M. Putuhena, Poka, Ambon, Maluku Indonesia
Email: alifsr68@gmail.com

Article History

Received: 13-09-2025

Revision: 11-10-2025

Accepted: 22-10-2025

Published: 28-10-2025

Abstract. Indonesia is an archipelagic country consisting of 17,504 islands (Law No. 6 of 1996 concerning Indonesian Waters), has a variety of unique and natural potentials spread from Sabang to Merauke. Negeri Ureng is located on the north coast of Leihitu District, Central Maluku Regency. It consists of 4 (four) regions, including the Seram Sea and West Seram Regency to the north, Ambon City to the south, Negeri Lima Village to the west, and Assilulu Village to the east. The area covers 468.75 ha with a population of 6,704 people. There are 460 residents who make a living as fishermen, with a percentage of 15.93% of the total population according to occupation of 2,866 people. The purpose of this study was to determine the level of availability and need for fishing facilities and infrastructure in Negeri Ureng. The method used in this study is descriptive qualitative and scoring analysis. From the analysis results, it is known that the level of availability of basic facilities and infrastructure in the Negeri Ureng fishing settlement has a total value of 21.53 and the level of need, among others, requires one TPI unit, boat mooring, fish drying area, pier, market repair, dredging of canals and addition of canal stairs, and 5659 meters of drainage are needed to meet service standards.

Keywords: Fishermen, Availability, Needs, Facilities, Infrastructure

Abstrak. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau (UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia), memiliki beragam keunikan dan potensi alam yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Negeri Ureng berada di pesisir utara Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Terdiri dari 4 (empat) wilayah, di antaranya sebelah utara terdapat Laut Seram dan Kabupaten Seram Bagian Barat, sebelah selatan ada Kota Ambon, sebelah barat terdapat Desa Negeri Lima, serta sebelah timur terdapat Desa Assilulu. Luas wilayahnya mencapai 468,75 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 6.704 jiwa. Terdapat 460 penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan, dengan persentase 15,93% dari total penduduk menurut pekerjaan sebanyak 2.866 orang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan dan kebutuhan sarana serta prasarana nelayan di Negeri Ureng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan analisis skoring. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dasar di permukiman nelayan Negeri Ureng memiliki total nilai 21,53 dan tingkat kebutuhan, antara lain, dibutuhkan satu unit TPI, tambatan perahu, tempat penjemuran ikan, dermaga, perbaikan pasar, pengerukan kanda dan penambahan tangga kanal, serta dibutuhkan 5659 meter drainase untuk memenuhi standar pelayanan.

Kata Kunci: Nelayan, Ketersediaan, Kebutuhan, Sarana, Prasarana

How to Cite: Sukandar, A. S., Berhиту, P. T., & Botanri, A. A. (2025). Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Permukiman Nelayan di Negeri Ureng Kecamatan Leihitu. *HORIZON: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 3 (2), 97-115. <http://doi.org/10.54373/hijm.v3i2.3782>

PENDAHULUAN

Negeri Ureng berada di pesisir utara Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Terdiri dari 4 (empat) wilayah, diantaranya sebelah utara ada Laut Seram dan Kabupaten Seram Bagian Barat, sebelah selatan ada Kota Ambon, sebelah barat ada Desa Negeri Lima serta sebelah timur ada Desa Assilulu. Luas wilayah 468,75 ha dengan 6.827 penduduk. Terdapat 460 jiwa yang bermata pencaharian sebagai nelayan, dengan presentase 15,93% dari total penduduk menurut pekerjaan sebanyak 2.866 orang. (Kantor Desa Negeri Ureng, 2022)

Berdasarkan kondisi eksisting di kawasan pemukiman nelayan Negeri Ureng, telah tersedia sistem drainase yang terdiri dari saluran tersier dengan lebar 40-50 cm dan kedalaman 30 cm. Namun, cakupan layanan drainase ini belum mencakup seluruh kawasan, di mana masih terdapat beberapa blok permukiman yang belum memiliki akses ke saluran drainase. Saat ini, total panjang saluran drainase yang telah terbangun adalah 740,06 meter. Dengan kondisi tersebut, perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut agar seluruh kawasan pemukiman dapat terlayani oleh sistem drainase yang memadai. Hal ini penting untuk mencegah potensi genangan atau banjir, serta meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan pemukiman nelayan tersebut.

Terdapat pasar di Negeri Ureng namun belum berfungsi sampai saat ini dari tahun 2020 dikarenakan belum diijinkan dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, karena ada beberapa item pekerjaan seperti plafon dan keramik yang rusak sebelum pasar tersebut diresmikan. Lokasi pasar sudah sangat strategis karena kawasan pasar tersebut merupakan tempat transit para nelayan yang hendak melaut dan juga berdekatan dengan Negeri lain yang hendak berbelanja. (Sekretaris Negeri Ureng) maka dari itu untuk saat ini para nelayan lebih memilih untuk menjual hasil melaut mereka di pinggiran pantai atau mereka membawanya langsung ke pasar Kota Ambon, karena kondisi fasilitas pasar yang tidak memadai. Selain terdapat pasar, juga terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI), namun TPI ini tidak membeli hasil tangkapan dari nelayan sekitar dikarenakan mereka hanya menerima ikan tuna, sedangkan umumnya para nelayan biasanya menangkap ikan momar, kawalnya, dan komu. Selain itu di Negeri Ureng belum memiliki fasilitas dermaga untuk memudahkan para nelayan dalam bongkar muatan hasil tangkapan laut. Tujuan penelitian: 1) Mengidentifikasi tingkat ketersediaan sarana dan prasarana nelayan di Negeri Ureng, 2) Menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana nelayan di Negeri Ureng

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian survey dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya baik deskriptif maupun interpretasi angka. Penggunaan metode deskriptif bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk Negeri Ureng yang berprofesi sebagai nelayan yang mana sebanyak 460 orang. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik sampling dengan menggunakan rumus slovin, dengan rumus sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Analisis Skoring

Analisis Skoring adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketersediaan prasarana permukiman nelayan di Negeri Ureng. Adapun kriteria dari metode pembobotan ketersediaan sarana dan prasarana tersebut adalah sebagai berikut.

Adapun standar skor yang digunakan adalah:

Skor 5 untuk baik

Skor 3 untuk sedang

Skor 1 untuk buruk

Analisis Deskriptif Kualitatif

Rumusan masalah kedua yaitu bagaimana kebutuhan sarana dan prasarana dasar permukiman nelayan di Negeri Ureng. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang bersifat deskriptif yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian dengan menggambarkan atau menguraikan secara jelas bagaimana tingkat ketersediaan sarana permukiman nelayan di Negeri Ureng yang acuannya didasarkan pada peraturan SPM PU No. 534 Tahun 2001, dan SNI 03-1733-2004.

HASIL DAN DISKUSI

Letak Dan Luas Wilayah Negeri Ureng

Negeri Ureng terletak dipesisir barat pulau Ambon Jasirah Leihitu, Kedudukan Negeri Ureng sangat Strategis dalam hubungannya dengan negeri – negeri lain diwilayah kecamatan leihitu, oleh karena itu sangat mudah untuk dijangkau baik dengan kendaraan laut maupun darat lainnya. Negeri Ureng secara administratif termasuk dalam Wilayah Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku. Terletak di arah barat Ibukota Kecamatan dengan jarak 16 km dari Kantor Kecamatan. Jarak Negeri Ureng ke Ibukota Kabupaten 215 km. Waktu tempuh menuju pusat Kota Kecamatan sekitar 35 menit, sedangkan waktu tempuh menuju Ibukota Kabupaten kira – kira 5 jam. Negeri Ureng Terdiri dari 5 (lima) lingkungan / RT dan 3 (tiga) Dusun. Lingkungan dan Dusun tersebut adalah :

Lingkungan Waesia laut /Haita Loufira/RT.01

Lingkungan Waesia Darat/Lalamuli/RT.02

Lingkungan Waeyama Darat/ Waeyama Lamuli/RT.03

Lingan Waeyama laut/Haita Sailapi/RT.04

Lingkungan Asalale/Kambaras/RT.05

Tabel 1. Luas wilayah Negeri Ureng menurut penggunaannya

No	Penggunaan	Luas (ha)
1	Permukiman Umum	80
2	Tana Pekarangan	22
	Untuk Bangunan	10,75
	Sekolah	8
	Tempat Peribadatan	6
3	Kuburan/Makam	11
	Jalan	8
	Rekreasi Dan Olahraga	7
	Lain-Lain	
4	Pertanian Tanaman Pangan	120
5	Perkebunan	32
	Tanah Hutan	
6	Hutan Rakyat	51
	Hutan Lindung	21
	Hutan Asli	78
7	Tanah Kritis/Tandus	12
8	Padang Ilalang	2
Jumlah		468,75

Kependudukan

Perkembangan Jumlah Penduduk

Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa penduduk yang berada di kawasan permukiman nelayan sebagian besar penduduk asli Negeri Ureng. Adapun perkembangan jumlah penduduk enam tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2 Perkembangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2017-2023

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah(Jiwa)	Perkembangan Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan		
1	2017	2944	3498	6442	-
2	2018	2978	3531	6509	67
3	2019	3009	3565	6574	65
4	2020	3039	3598	6637	63
5	2021	3051	3611	6642	5
6	2022	3071	3633	6704	62
7	2023	3190	3637	6827	123

Berdasarkan Tabel 2 di atas, perkembangan jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, jumlah penduduk adalah 6.442 jiwa. Pada tahun 2019, jumlah penduduk meningkat menjadi 6.509 jiwa, yang berarti terjadi kenaikan sebesar 67 jiwa. Kenaikan serupa juga terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Hingga tahun ke-7, yaitu tahun 2023, jumlah penduduk mencapai 6.827 jiwa, mengalami kenaikan sebesar 123 jiwa dari tahun 2022 dan 385 jiwa dari tahun 2017.

Identifikasi Tingkat Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Permukiman Nelayan

Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Di Negeri Ureng, terdapat sebuah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berfungsi sebagai pusat perdagangan antara pemasok dan pembeli ikan. Meskipun TPI ini dirancang untuk mendukung aktivitas perikanan lokal, namun ia menghadapi tantangan signifikan karena kebijakan yang membatasi penerimaan hanya pada jenis ikan tuna. Sementara itu, sebagian besar nelayan di kawasan tersebut biasanya menangkap ikan jenis lain, seperti ikan layang (momar), selar (kawalnya), dan tongkol (komu), yang merupakan hasil tangkapan utama mereka. Ketidaksiesuaian antara jenis ikan yang ditangkap oleh nelayan dan jenis ikan yang diterima oleh TPI menciptakan masalah serius. Nelayan mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil tangkapan mereka, yang berdampak langsung pada penghasilan mereka dan

stabilitas ekonomi mereka. Ketidakmampuan untuk menjual ikan yang ditangkap melalui TPI dapat menyebabkan penurunan pendapatan.

Tabel 3. Tingkat ketersediaan TPI

No	Parameter	Kriteria	Nilai
1	Keberadaan	Sedang	3
2	Kondisi	Sedang	3
3	Pemanfaatan	Buruk	1
Jumlah			7
Rata-Rata		Buruk	2,33

Berdasarkan Tabel 3 di atas, keberadaan TPI dikategorikan sebagai sedang. Hal ini didasarkan pada analisis skoring, di mana TPI yang ada tetapi tidak berfungsi maka termasuk dalam kategori sedang dan mendapatkan nilai/skor 3. Selanjutnya, untuk kondisi, berdasarkan pengamatan langsung, dikategorikan sedang karena kurangnya beberapa fasilitas fungsional dan penunjang lainnya yang seharusnya ada di TPI tidak tersedia, seperti gedung administrasi dan menara air. Untuk pemanfaatannya, peneliti memberikan kriteria buruk dengan nilai/skor 1, karena TPI yang ada di Negeri Ureng bukanlah milik negeri dan TPI tersebut tidak menerima hasil tangkapan nelayan setempat. Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat ketersediaan TPI adalah 2,33 sehingga mengacu pada metode pembobotan yang ada, kriteria ketersediaan TPI dikategorikan buruk.

Tambatan Perahu

Tambatan perahu di permukiman nelayan memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan mendukung keberlanjutan ekonomi lokal. Sebuah tambatan perahu yang memadai tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan perahu, tetapi juga berperan dalam memastikan perawatan perahu yang lebih baik. Dengan adanya fasilitas ini, nelayan dapat menjaga perahu mereka dalam kondisi optimal, mengurangi kerusakan akibat cuaca buruk atau abrasi, dan memperpanjang umur peralatan yang mereka gunakan.

Berdasarkan hasil survei di lapangan, permukiman nelayan Negeri Ureng tidak memiliki tambatan perahu. Ketiadaan fasilitas ini menyebabkan berbagai tantangan bagi nelayan setempat, seperti kesulitan dalam menyimpan perahu dengan aman, risiko kerusakan yang lebih tinggi akibat cuaca ekstrem, serta meningkatnya biaya perawatan dan perbaikan. Tanpa tambatan yang layak, nelayan juga harus berusaha lebih keras untuk menambatkan perahu secara mandiri, yang sering kali tidak efektif dan berpotensi menimbulkan kerugian.

Tabel 4. Tingkat Ketersediaan Tambatan Perahu

No	Parameter	Kriteria	Nilai
1	Keberadaan	Buruk	1
2	Kondisi	Buruk	1
3	Pemanfaatan	Buruk	1
Jumlah			3
Rata-Rata		Buruk	1

Berdasarkan Tabel 4 di atas, Tambatan Perahu dikategorikan sebagai Buruk. Hal ini didasarkan pada analisis skoring, di mana tambatan perahu belum tersedia maka termasuk dalam kategori buruk dan mendapatkan nilai/skor 1. Untuk kondisi, dan pemanfaatan dikategorikan buruk karena tambatan perahu belum tersedia di Negeri Ureng. Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat ketersediaan Tambatan Perahu adalah 1 sehingga mengacu pada metode pembobotan yang ada, kriteria ketersediaan Tambatan Perahu dikategorikan buruk.

Tempat Penjemuran Ikan

Tempat penjemuran ikan di permukiman nelayan merupakan salah satu fasilitas penting yang mendukung kegiatan perikanan dan perekonomian masyarakat nelayan. Sebagai bagian dari proses pengolahan hasil tangkapan, tempat ini berfungsi untuk mengeringkan ikan agar dapat diawetkan lebih lama sebelum dipasarkan atau dikonsumsi. Proses pengeringan ini sangat bergantung pada kondisi cuaca dan fasilitas yang tersedia, sehingga keberadaan tempat penjemuran yang layak menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas hasil perikanan. Di permukiman nelayan, ikan dijemur di atas para-para bambu, jaring, atau alas berbahan semen yang terkena sinar matahari langsung. Namun, jika tempat penjemuran tidak memadai, misalnya karena luasnya terbatas, kebersihannya kurang terjaga, atau tidak memiliki perlindungan dari hujan dan debu maka kualitas ikan kering yang dihasilkan bisa menurun. Hal ini dapat berpengaruh terhadap harga jual dan daya saing produk di pasar. Berdasarkan hasil survei di lapangan, permukiman nelayan di Negeri Ureng tidak memiliki tempat penjemuran ikan yang memadai. Hal ini menjadi kendala bagi masyarakat nelayan dalam mengolah hasil tangkapan mereka, khususnya dalam proses pengeringan ikan sebagai salah satu metode pengawetan tradisional. Tanpa fasilitas penjemuran yang layak, nelayan harus mencari alternatif lain, seperti menjemur ikan di sembarang tempat, termasuk di atas tanah, di pinggir jalan, atau di area terbuka yang tidak terjamin kebersihannya.

Tabel 5. Tingkat ketersediaan tempat penjemuran ikan

No	Parameter	Kriteria	Nilai
1	Kondisi	Buruk	1
2		Buruk	1
3		Pemanfaatan	Buruk
Jumlah			3
Rata-Rata		Buruk	1

Berdasarkan Tabel 5 di atas, Tempat Penjemuran Ikan dikategorikan sebagai Buruk. Hal ini didasarkan pada analisis skoring, di mana Tempat Penjemuran Ikan belum tersedia maka termasuk dalam kategori buruk dan mendapatkan nilai/skor 1. Untuk kondisi, dan pemanfaatan dikategorikan buruk karena Tempat Penjemuran Ikan belum tersedia di Negeri Ureng. Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat ketersediaan Tempat Penjemuran Ikan adalah 1 sehingga mengacu pada metode pembobotan yang ada, kriteria ketersediaan Tempat Penjemuran Ikan dikategorikan buruk.

Prasarana Permukiman Nelayan

Dermaga

Dermaga merupakan prasarana dasar yang sangat penting dalam pembangunan permukiman nelayan. Fungsinya mencakup berbagai aspek vital seperti tempat pendaratan perahu nelayan, lokasi untuk bongkar muat hasil tangkapan, dan area yang aman bagi perahu-perahu untuk berlabuh. Dalam konteks lokasi penelitian yang sedang dibahas, prasarana dermaga ini belum tersedia, sehingga variabel ini dapat dikategorikan tidak memadai.

Tabel 6. Tingkat ketersediaan dermaga

No	Parameter	Kriteria	Nilai
1	Keberadaan	Buruk	1
2	Kondisi	Buruk	1
3	Pemanfaatan	Buruk	1
Jumlah			3
Rata-Rata		Buruk	1

Berdasarkan Tabel 6 di atas, nilai keberadaan, kondisi, dan pemanfaatan diperoleh dari survei langsung yang dilakukan oleh peneliti. Tidak terdapat dermaga milik pemerintah di Negeri Ureng. Berdasarkan analisis skoring, jika dermaga belum berfungsi, maka diberikan skor 1. Sedangkan kondisi dan pemanfaatanpun diberikan skor 1 karena tidak adanya dermaga. Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat ketersediaan dermaga adalah 1 sehingga mengacu pada metode pembobotan yang ada, kriteria ketersediaan dermaga dikategorikan buruk.

Kanal

Kampung nelayan sebagai wadah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, maka konsep perencanaan diatur agar sedapat mungkin mendekatkan area hunian dengan laut sebagai tempat kerja bagi nelayan. Berdasarkan perencanaan, sistem perangkutan didominasi oleh matra angkutan laut. Pada permukiman nelayan telah dibuat kanal buatan oleh pengembang yang berfungsi sebagai lalu lintas air bagi permukiman nelayan. Dari hasil survey lapangan, kedalaman kanal buatan ini sekitar 1 meter hingga 1,5 meter dengan lebar 10 meter. Kanal di permukiman nelayan yang pada awalnya memiliki kedalaman 3,5 meter kini mengalami pendangkalan akibat sedimentasi tanah dan lumpur sehingga kedalamannya berkurang menjadi 1 meter. Sedimentasi ini diakibatkan oleh abrasi dinding kanal yang tidak bertalut sehingga secara umum kondisi kanal saat ini di kawasan pemukiman nelayan Ureng tidak dapat dilalui perahu-perhaun nelayan. Maka berdasarkan keberadaannya, dermaga diberi skor 1. Ketika air pasang ketinggian air kanal mencapai 1 meter, sedangkan ketika air surut maka air kanal tergenang akibat pengendapan lumpur yang terlalu tinggi sehingga menghambat aliran air mencapai kelaut.

Tabel 7. Tingkat ketersediaan kanal

No	Parameter	Kriteria	Nilai
1	Keberadaan	Sedang	3
2	Kondisi	Buruk	1
3	Pemanfaatan	Buruk	1
Jumlah			5
Rata-Rata		Buruk	1,6

Berdasarkan table 7 di atas, nilai dari parameter keberadaan, kondisi, dan pemanfaatan diperoleh dari hasil analisis skoring. Untuk parameter keberadaan kanal, dikategorikan sedang dan diberi skor 3, karena terdapat kanal di permukiman nelayan Negeri Ureng, tetapi tidak dapat dilalui oleh perahu nelayan. Selanjutnya, untuk kondisi, dikategorikan buruk, karena dari 82 sampel, 0% menyatakan baik. Dengan demikian, jika kurang dari 40% sampel menilai baik, maka skornya adalah 1. Sedangkan untuk pemanfaatan, diberikan skor 1 dengan kategori buruk, karena seluruh sampel menyatakan bahwa kanal tidak dapat difungsikan. Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat ketersediaan kanal adalah 1,6 sehingga mengacu pada metode pembobotan yang ada, kriteria kondisi kanal dikategorikan buruk.

Jaringan Drainase

Berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan, dikawasan pemukiman nelayan Negeri Ureng telah memiliki drainase, jenis drainase yaitu primer berupa kanal dan tersier dengan lebar drainase tersier 40-50 cm dan kedalaman 30 cm, namun belum melayani seluruh kawasan, dimana masih terdapat beberapa blok pemukiman yang belum memiliki saluran drainase. Untuk SPM (Standar Pelayanan Minimal) drainase adalah 80m/ha. Total luas kawasan pemukiman adalah 80 ha. Total panjang drainase eksisting adalah 740,06 meter.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa dengan luas 80 ha, kawasan pemukiman nelayan Negeri Ureng harus memiliki 6400 meter drainase. Sementara drainase yang ada saat ini adalah 740,06 meter, atau hanya 11,56% dari total drainase yang seharusnya ada di dalam kawasan. Butuh 5659 meter lagi agar mencapai standar pelayanan. Berdasarkan pedoman yang ada, apabila <40% panjang drainase sesuai dengan ketentuan, maka skor yang diberikan adalah 1. Kondisi jaringan drainase yang terdapat pada permukiman nelayan berupa got permanen yang terbuat dari galian yang telah dilapisi semen. Berdasarkan hasil survei, aliran air tersebut menuju kanal yang mengelilingi blok permukiman. Drainase ini memiliki kondisi yang baik, tidak ada yang rusak, dan tidak terdapat sedimen, sehingga aliran air dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem drainase di permukiman nelayan ini terawat dengan baik dan efektif dalam mengelola aliran air, yang pada akhirnya membantu mencegah banjir dan menjaga kebersihan lingkungan.

Tabel 8. Tingkat ketersediaan drainase

No	Parameter	Kriteria	Nilai
1	Panjang drainase	Buruk	1
2	Kondisi	Baik	5
Jumlah			6
Rata-Rata			3

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat ketersediaan drainase adalah 6 dengan rata-rata 2. Dari hasil diatas dapat diketahui rata-rata tingkat ketersediaan drainase adalah 3 sehingga mengacu pada metode pembobotan yang ada, kriteria ketersediaan drainase dikategorikan sedang.

Layanan Air Bersih

Untuk ketersediaan layanan air bersih di Negeri Ureng telah terlayani pipa Penyedia Air Minum Desa (PAMDes). Yang mana merupakan swakelola masyarakat yang menjadi mitra pemerintah yang bergerak sebagai petugas pasokan air di Negeri Ureng. Berdasarkan

perhitungan diketahui bahwa ketersediaan layanan air bersih sebesar 1.814.400 ltr/hr, sedangkan kebutuhannya sebesar 409.620 ltr/hr sehingga berdasarkan pedoman dimana ketika > 70% sampel telah terlayani air bersih PAMDes, skornya adalah 5. Untuk mengukur kualitas air bersih dikawasan permukiman nelayan Negeri Ureng, dilakukan dengan menggunakan presepsi sampel, dimana indicator yang digunakan adalah bau dan warna.

Dari segi pemenuhan kebutuhan air bersih bagi penduduk permukiman nelayan yang telah dilayani oleh PAMDes, penyaluran air ini tidak memiliki masalah. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga bahwa pelayanan air bersih oleh PAMDes sangat baik dalam arti air PAMDes mengalir setiap hari, diketahui bahwa rata-rata lama air mengalir adalah 24 jam per hari. Berdasarkan pedoman yang ada, apabila air mengalir antara 16,8 jam perhari maka skor yang diberikan adalah 5.

Tabel 9. Tingkat ketersediaan air bersih

No	Parameter	Kriteria	Nilai
1	Layanan Air Bersih	Baik	5
2	Kualitas Air Bersih	Baik	5
3	Komunitas Air Bersih	Baik	5
Jumlah			15
Rata Rata		Baik	5

Dari tabel 9, dapat diketahui bahwa total nilai tingkat ketersediaan air bersih adalah 15 dengan rata-rata 5. Dari hasil analisis dapat diketahui rata-rata tingkat ketersediaan air bersih adalah 5 sehingga mengacu pada metode pembobotan yang ada, kriteria ketersediaan drainase dikategorikan baik.

Jaringan Jalan

Berdasarkan norma standar pedoman manual tentang jalan yang tercantum pada Standar Pelayanan Minimum No. 534 Tahun 2001, ditetapkan bahwa standar untuk panjang jalan pada suatu wilayah adalah adalah 60 Meter/Ha yang berarti bahwa dalam tiap 1 Ha diperlukan jalan sepanjang 60 meter. Kondisi eksisting luas wilayah Kawasan Permukiman Nelayan Negeri Ureng yang berjumlah 80 Ha dan panjang jalan dikawasan tersebut berdasarkan hasil perhitungan analisis GIS dari interpretasi peta tahun 2024 adalah 5396,61 meter, lebih dari standar pelayanan. Maka dapat ditetapkan bahwa keberadaan panjang jalan di kawasan ini lebih dari 70% dari ketentuan standar pelayanan minimum, sehingga diberi skor 5.

Berdasarkan hasil survey lapangan dan perhitungan analisis GIS dari interpretasi peta tahun 2024 diketahui seluruh jalan atau 5395,61 meter jalan didalam kawasan pemukiman nelayan Negeri Ureng merupakan aspal. Berdasarkan pedoman yang ada apabila $> 70\%$ dari total jalan merupakan aspal, maka skor yang diberikan adalah 5. Berdasarkan hasil survey lapangan dan interpretasi peta diketahui seluruh jalan atau 5395,61 meter, jalan didalam kawasan pemukiman nelayan Negeri Ureng merupakan jalan beraspal, dimana terdapat 309,68 meter jalan yang rusak. Berdasarkan pedoman yang ada apabila $< 3\%$ dari total jalan aspal rusak, maka skor yang diberikan adalah 5.

Tabel 10. Tingkat ketersediaan jaringan jalan

No	Parameter	Kriteria	Nilai
1	Panjang Jalan	Baik	5
2	Lapisan Permukaan Jalan	Baik	5
3	Tingkat Kerusakan Jalan	Baik	5
Jumlah			15
Rata-Rata		Baik	5

Dari tabel 10 dapat diketahui bahwa total nilai tingkat ketersediaan prasarana jalan adalah 15 dengan rata-rata 5. Dari hasil analisis dapat diketahui rata-rata tingkat ketersediaan prasarana jalan adalah 5 sehingga mengacu pada metode pembobotan yang ada, kriteria ketersediaan prasarana jalan dikategorikan baik.

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dasar di Permukiman Nelayan Negeri Ureng dengan total nilai 21,39. Dari hasil rekapitulasi, dapat ditetapkan bahwa tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Permukiman Nelayan Negeri Ureng Buruk. Adapun jenis prasarana yang buruk yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) karena kebijakan yang membatasi penerimaan hanya pada jenis ikan tuna. Sedangkan para nelayan tersebut biasanya menangkap ikan jenis lain, seperti ikan layang (momar), selar (kawalnya), dan tongkol (komu). Selanjutnya Tambatan perahu dan Tempat Penjumuran Ikan yang belum tersedia di Negeri Ureng. Pasar dan kanal yang sudah ada namun kurang pemeliharaan dan tidak termanfaatkan sesuai pemanfaatannya, serta dermaga yang tidak dimiliki oleh pemerintah Negeri Ureng. Selanjutnya, jenis prasarana yang masuk kategori sedang adalah jaringan drainase, dikategorikan sedang karena panjang dari jaringan drainase tersebut belum memenuhi standar yang ditetapkan, namun untuk kondisi jaringan drainase dikategorikan baik karena tidak ada yang rusak serta tidak adanya sedimen, sehingga aliran air dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Kemudian, jenis sarana yang memadai atau dikategorikan baik di permukiman

nelayan Negeri Ureng meliputi jaringan jalan dan air bersih karena telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Kebutuhan Sarana Permukiman Nelayan di Negeri Ureng

Di kawasan permukiman nelayan Negeri Ureng, terdapat sebuah tempat pelelangan ikan (TPI) yang dimiliki oleh perusahaan asing. Sayangnya, TPI ini tidak dapat diandalkan oleh nelayan setempat karena hanya menerima jenis ikan tertentu, seperti ikan tuna. Hal ini menyebabkan banyak nelayan kesulitan dalam memasarkan hasil tangkapan mereka, terutama ikan-ikan lain yang tidak diterima oleh TPI tersebut.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mendirikan satu unit TPI milik pemerintah Negeri Ureng yang berlokasi strategis di sekitar pasar, dengan luas yang di butuhkan sekitar 0.02 ha serta luas tempat $< 500 \text{ m}^2$, berdasarkan rancangan standar nasional indonesia 3 (RSNI3 9288-1:2024). Hal ini bertujuan agar meminimalisir anggaran yang keluar dalam membawa ikan ke tempat yang lebih jauh, TPI ini dirancang untuk menerima segala jenis hasil tangkapan laut nelayan, sehingga mereka dapat menjual ikan mereka dengan harga yang lebih baik dan beragam. Selain meningkatkan pendapatan nelayan, keberadaan TPI pemerintah juga akan mendukung keberlanjutan sektor perikanan lokal dan memperkuat perekonomian masyarakat di Negeri Ureng. Dengan demikian, nelayan tidak lagi tergantung pada kebijakan perusahaan asing, dan mereka dapat merasakan manfaat langsung dari hasil usaha mereka.

Tambatan Perahu

Berdasarkan hasil survei di Negeri Ureng, diketahui bahwa di permukiman nelayan Negeri Ureng belum tersedia tambatan perahu. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai kerugian bagi nelayan, di antaranya kerusakan perahu dan alat tangkap. Perahu yang tidak memiliki tambatan yang aman berisiko mengalami kerusakan akibat terbentur atau tergesek dengan objek lain. Sementara itu, alat tangkap yang tidak memiliki tempat penyimpanan yang aman dapat mengalami kerusakan atau bahkan hilang. Oleh karena itu, diperlukan tempat untuk menambatkan perahu agar nelayan tidak mengalami kerugian ekonomi. Kerusakan perahu dan alat tangkap dapat berdampak pada ekonomi nelayan, serta keterlambatan dan gangguan aktivitas mereka dapat menyebabkan penurunan pendapatan.

Tempat Penjemuran Ikan

Berdasarkan hasil survei di lapangan, permukiman nelayan di Negeri Ureng tidak memiliki tempat penjemuran ikan yang memadai. Hal ini menjadi kendala bagi masyarakat nelayan dalam mengolah hasil tangkapan mereka, khususnya dalam proses pengeringan ikan sebagai salah satu metode pengawetan tradisional. Tanpa fasilitas penjemuran yang layak, nelayan harus mencari alternatif lain, seperti menjemur ikan di sembarang tempat, termasuk di atas tanah, di pinggir jalan, atau di area terbuka yang tidak terjamin kebersihannya. Oleh karena itu diperlukan tempat penjemuran ikan di sekitar area pasar agar kiranya masyarakat setempat tidak mengeringkan ikan di area yang tidak semestinya.

Pasar

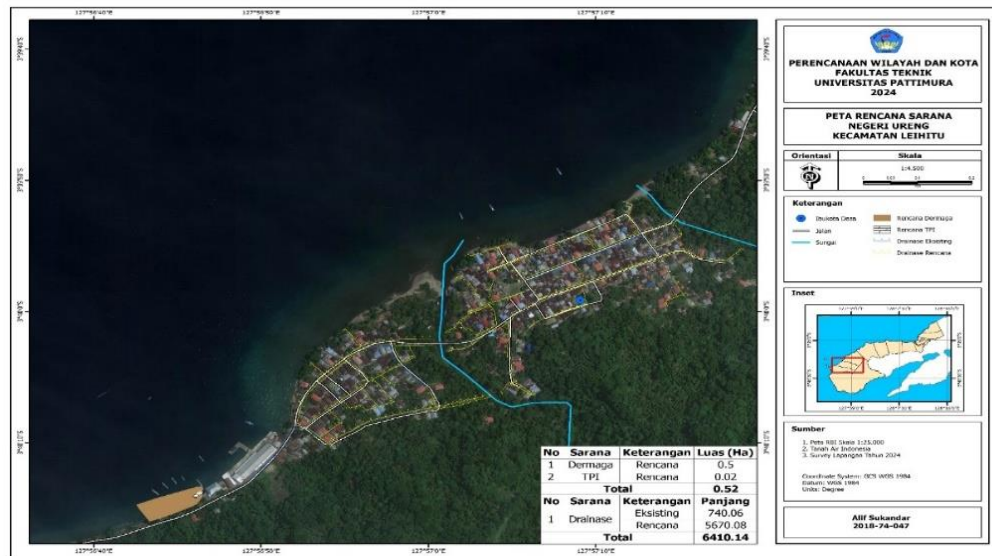
Terdapat pasar di Negeri Ureng, namun tidak berfungsi atau tidak digunakan oleh masyarakat setempat untuk berjualan, disebabkan belum diijinkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Karena itu, perlu menyelesaikan atau memperbaiki kerusakan pasar di Negeri Ureng. Pasar tersebut sudah mengalami kerusakan dan tidak mendapatkan perbaikan atau renovasi selama empat tahun sejak tahun 2020. Situasi ini tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi nelayan di Negeri Ureng tetapi juga berdampak pada kualitas hidup nelayan yang bergantung pada pasar tersebut. Perbaikan yang cepat dan efektif sangat penting untuk memulihkan fungsi pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial di Negeri Ureng.

Kebutuhan Prasarana Permukiman Nelayan Di Negeri Ureng

Dermaga

Berdasarkan hasil survei, diketahui bahwa tidak ada dermaga yang dimiliki oleh Pemerintah Negeri Ureng. Kondisi ini menghambat aksesibilitas nelayan dalam melakukan aktivitas bongkar muat hasil tangkapan mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera melakukan pembangunan dermaga yang berlokasi di dekat pasar, dengan luas yang di butuhkan sekitar 0.5 ha serta panjang dermaga 13 -20 m, berdasarkan rancangan standar nasional indonesia 3 (RSNI3 9288-1:2024). Agar meminimalisir jarak nelayan dalam membawa hasil tangkapan ke pasar yang lebih jauh. Selain itu, dermaga tersebut juga memerlukan infrastruktur penunjang yang memadai, seperti area penyimpanan ikan, fasilitas pengolahan, dan aksesibilitas transportasi yang baik. Dengan adanya fasilitas ini, fungsi dermaga sebagai pelabuhan bongkar muat akan berjalan optimal, memberikan kemudahan bagi nelayan dan meningkatkan efisiensi proses distribusi hasil tangkapan. Dengan

pembangunan dermaga yang tepat, diharapkan kesejahteraan nelayan dapat meningkat dan sektor perikanan di Negeri Ureng dapat berkembang lebih baik.



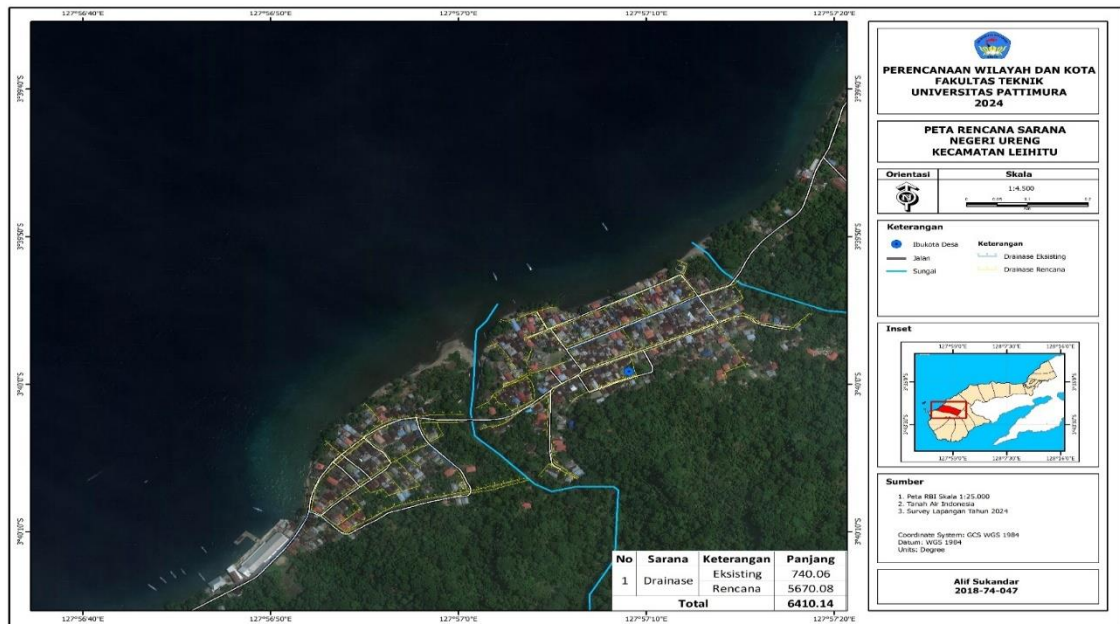
Gambar 1. Peta Rencana Lokasi TPI Dan Dermaga di Negeri Ureng

Kanal

Sesuai hasil analisis yang ada, kanal di permukiman nelayan Negeri Ureng belum memadai sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan fungsi yang ada dengan melakukan pengerukan dibagian kanal yang telah mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Selain itu, dibutuhkan juga tangga kanal agar para nelayan lebih mudah naik atau turun menuju perahu.

Jaringan Drainase

Berdasarkan hasil survei peneliti, drainase di Kawasan Permukiman Nelayan Negeri Ureng masuk dalam kategori sedang. Karena panjang dari jaringan drainase tersebut belum memenuhi standar pelayanan dimana Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah 80m/ha, harus memiliki 6400 meter drainase sedangkan total panjang drainase eksisting 740,06 meter atau hanya 11,56% dari total drainase yang seharusnya ada didalam Kawasan. Butuh 5659 meter lagi untuk memenuhi standar pelayanan.



Gambar 2. Peta Rencana Kebutuhan Drainase Permukiman Nelayan di Negeri Ureng

Jaringan Air Bersih

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 6728.1:2015) standar kebutuhan air bersih per orang adalah 60 Ltr/org/hr. Berdasarkan hasil survei peneliti, kondisi eksisting untuk jaringan air bersih di kawasan permukiman nelayan di Negeri Ureng dengan jumlah penduduk mencapai 6.827 jiwa, maka kebutuhan air bersih untuk seluruh penduduk di Negeri Ureng mencapai 409.620 Ltr/hr. Di mana kebutuhan air bersih di Negeri Ureng telah terpenuhi oleh sistem penyediaan air melalui PAMDes di Negeri Ureng yang mampu mengalirkan air selama 24 jam non-stop, yang berarti kebutuhan air bersih bagi seluruh penduduk dapat tercukupi dengan baik.

Jaringan Jalan

Menurut Standar Pelayanan Minimum No. 534 Tahun 2001, ditetapkan bahwa standar untuk panjang jalan pada suatu wilayah adalah 60 Meter/Ha. Berdasarkan hasil survei peneliti, kondisi eksisting luas wilayah kawasan Permukiman Nelayan Negeri Ureng yang berjumlah 80 Ha dan panjang jalan dikawasan tersebut berdasarkan hasil perhitungan analisis GIS dari interpretasi peta tahun 2024 adalah 5395,61 meter lebih dari standar pelayanan dengan panjang jalan yang rusak yaitu 309,68 meter. Jalan yang ada saat ini telah baik dan hanya membutuhkan sedikit perbaikan di jalan yang bergelombang dan berlubang serta pemeliharaan guna menjaga kondisi yang ada

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi dapat diketahui bahwa tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Permukiman Nelayan Negeri Ureng Buruk. Adapun jenis sarana dan prasarana yang buruk yaitu:

- Tempat Pelelangan Ikan (TPI) karena kebijakan yang membatasi penerimaan hanya pada jenis ikan tuna. Sedangkan para nelayan tersebut biasanya menangkap ikan jenis lain, seperti ikan layang (momar), selar (kawalnya), dan tongkol (komu).
- Tambatan Perahu di Negeri Ureng belum tersedia yang berisiko menyebabkan kerusakan perahu dan alat tangkap. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi bagi nelayan serta menghambat aktivitas mereka, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan fasilitas tambatan perahu untuk mendukung kesejahteraan nelayan.
- Tempat Penjemuran Ikan di Negeri Ureng belum tersedia sehingga nelayan kesulitan dalam mengolah hasil tangkapan mereka. Tanpa fasilitas yang layak, ikan sering dijemur di sembarang tempat yang tidak higienis. Oleh karena itu, diperlukan tempat penjemuran ikan di sekitar area pasar agar proses pengeringan lebih terjamin kebersihannya dan lebih efektif.
- Pasar yang belum berfungsi sejak tahun 2020. Penundaan ini dikarenakan belum mendapatkan izin dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, dengan beralasan bahwa pasar tersebut akan direnovasi setelah pekerjaan selesai. Kerusakan pada beberapa item, seperti plafon dan keramik ditemukan sebelum pasar tersebut diresmikan.
- Kanal yang sudah ada namun kurang pemeliharaan dan tidak termanfaatkan sesuai pemanfaatannya sebagai prasarana transportasi serta dermaga yang tidak dimiliki oleh pemerintah Negeri Ureng.

Kebutuhan sarana dan prasarana Permukiman Nelayan di Negeri Ureng yang belum ada seperti TPI, Tambatan Perahu, Tempat Penjemuran Ikan dan Dermaga. Maka dibutuhkan 1 unit TPI, Tambatan Perahu, Tempat Penjemuran Ikan dan 1 unit Dermaga agar para nelayan bisa memasarkan dan menjual hasil tangkapan mereka serta perahu para nelayan dapat parkir dengan baik dan aman. Untuk prasarana seperti Kanal sebagai prasarana transportasi para nelayan diperlukan upaya untuk meningkatkan fungsi yang ada dengan melakukan pengerukan dibagian kanal yang telah mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Jadi untuk peningkatan beberapa sarana dan prasarana maka dibutuhkan pemeliharaan untuk pengoptimalan fungsi setiap sarana prasarana yang ada di Permukiman Nelayan Negeri Ureng.

REKOMENDASI

Berikut ini rekomendasi saran untuk meningkatkan sarana dan prasarana di Permukiman Nelayan Negeri Ureng:

- Diperlukan revisi peraturan pada TPI agar dapat menerima lebih dari satu jenis ikan, seperti ikan layang, selar, dan tongkol, yang sering ditangkap oleh para nelayan setempat. Hal ini akan memberikan fleksibilitas bagi para nelayan dalam memasarkan hasil tangkapan mereka dan meningkatkan pendapatan mereka.
- Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah diharapkan memberikan izin dan menyelesaikan proses renovasi pada pasar yang sudah ada, dengan memperbaiki kerusakan seperti plafon dan keramik yang belum terselesaikan sejak 2020. Aktivasi pasar ini akan menyediakan tempat yang layak bagi nelayan dan warga untuk berjualan dan bertransaksi.
- Karena Negeri Ureng belum memiliki dermaga, tambatan perahu serta tempat penjemuran ikan maka dibutuhkan pembangunan satu unit dermaga, tempat penjemuran ikan dan tambatan perahu untuk memfasilitasi kegiatan perikanan, seperti bongkar-muat hasil tangkapan nelayan, parkir perahu nelayan dan penjemuran ikan hasil tangkapan nelayan. Hal ini akan membantu mengoptimalkan transportasi hasil tangkapan, memudahkan akses para nelayan serta membantu perekonomian nelayan yang lebih baik.
- Diperlukan pengerukan pada kanal untuk mengatasi sedimentasi dan menjaga fungsi kanal sebagai jalur transportasi.

REFERENSI

- Ardhi, P. H., Rejeki, V. G. S., & Ardiyanto, A. (2022). Strategi Penataan Permukiman Nelayan Keberlanjutan di Tepi Sungai Kaliyasa. *Review of Urbanism and Architectural Studies*, 20(1), 1–11. <https://doi.org/10.21776/ub.ruas.2022.020.01.1>
- Astriadi, & Wilis. (2018). *Kriteria Dasar Infrastruktur Permukiman Pada Daerah Nelayan (Contoh Kasus Daerah Nelayan Kota Sorong)*.
- Ayuningsih, Y. A. (2019). *Arahan Pengembangan Permukiman Masyarakat Suku Bajo Di Wilayah Pesisir Kelurahan Bajoe, Kabupaten Bone* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Hair, S. Permukiman Nelayan Untia Berbasis Ekowisata Di Makassar.
- Indonesia, P. R. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. *Sekretariat Negara. Jakarta*.
- Indonesia, S. N. 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. *Jakarta. FINAL GRADE/0*.
- Karya, D. C. (2006). Pedoman Identifikasi Kawasan Kumuh Daerah Penyangga Kota Metropolitan. *Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum*.
- Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Nomor: 43/KPTS/CK/1999 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Perumahan Nelayan.

- Maretha, & Sunartha. (2012). *Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Cilacap Kabupaten Cilacap Melalui Peningkatan Kualitas Fisik Lingkungan*. Universitas Diponegoro .
- Maryono, A., Priadi, E., & Andi, U. (2019). Penataan Infrastruktur Kawasan Permukiman Nelayan Di Kelurahan Kuala, Kota Singkawang. *Jurnal Teknik Sipil*.
- No, U.U. (6). tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. *Jakarta: UURI*.
- Nomor, U. U. (1). tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/Permen/M/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Nelayan*.
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur*
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman*.
- Ridwan, & Giyarsih. (2012). Kualitas Lingkungan Permukiman Masyarakat Suku Bajo di Daerah yang Berkarakter Pinggiran Kota dan Daerah Berkarakter Pedesaan di Kabupaten Muna . *Jurnal Pembangunan Dan Kota* .
- Sadana, A. (2014). *Perencanaan Kawasan Permukiman*. Graha Ilmu.
- Setiawan, Hilman. Disertasi. Penataan Permukiman Nelayan terhadap Kegiatan Perikanan Sepanjang Pesisir Kelurahan Ponjalae, Kota Palopo. *Program Pascasarjana UIN Alauddin. Makassar* (2016).
- SNI 6728.1:2015, Penyusunan Neraca Spasial SumberDaya Alam - Bagian 1: Sumber Daya Air. Badan Standarisasi Nasional.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Perumahan dan Kawasan Permukiman
- SPM, P. No. 534 Tahun 2001 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang. *Perumahan Dan Permukiman Dan Pekerjaan Umum*.
- Umum, K. P., & Rakyat, P. (2022). Buku Saku-Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh. *Jakarta: Pengawasan dan Pengendalian Pusat Kegiatan IBM Direktorat PKP*, 10.
- Widjajanti, & Hendra. (2013). *Penataan Permukiman Nelayan di Pantai Mayangan*. Probolinggo Jawa Timur. Simposium Nasional RAPI XII.
- Zuhro, L., Wesnawa, G., & Sarmita, M. (2019). Kualitas Permukiman Nelayan Wilayah Pesisir Di Desa Anturan Kecamatan Buleleng (Kajian Kualitas Permukiman Skala Mikro). *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*.